

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

TESIS

DONI MAULUDI SUPENO

NPM : 22302091016



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

2026

ABSTRAK

Doni Mauludi Supeno, Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Dosen Pembimbing I: Prof. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II: Dr. Sunariyanto, S.Sos., MM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. SIPD merupakan kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui integrasi data, transparansi, serta efisiensi proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas, khususnya dalam aspek transparansi informasi, tertib administrasi perencanaan, serta konsistensi penganggaran.

Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, hambatan teknis pada infrastruktur teknologi informasi, serta ketidaksesuaian alur kerja dengan kebutuhan operasional perangkat daerah. Sedangkan faktor kunci keberhasilan implementasi meliputi dukungan pimpinan daerah, koordinasi yang efektif antar organisasi perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas pengguna melalui pelatihan berkelanjutan.

Sementara itu, faktor penghambat terutama berasal dari aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan rendahnya tingkat kesiapan birokrasi dalam beradaptasi terhadap perubahan sistem digital.

Kata kunci : Implementasi kebijakan publik, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Akuntabilitas

ABSTRACT

Doni Mauludi Supeno, Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) Policy in Improving the Accountability of the Pasuruan Regency Regional Government. Master of Public Administration, Postgraduate Program, Universitas Islam Malang. Supervisor I: Prof. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D. Supervisor II: Dr. Sunariyanto, S.Sos., MM.

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) Policy in enhancing the accountability of the Pasuruan Regency Government. SIPD is a national policy initiated by the Ministry of Home Affairs as an effort to strengthen governance through data integration, transparency, and efficiency in regional planning and budgeting processes.

This research employs a qualitative approach with a descriptive design, using data collection techniques including in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of SIPD in Pasuruan Regency has made a positive contribution to improving accountability, particularly in terms of information transparency, administrative order in planning, and consistency in budgeting.

However, the implementation still encounters several challenges, including limited human resource competencies, technical constraints in information technology infrastructure, and misalignment between workflow and the operational needs of regional government units.

Meanwhile, the key success factors include the support of regional leaders, effective coordination among regional government organizations, and capacity building for users through continuous training. On the other hand, the inhibiting factors primarily stem from policy communication issues, limited supporting facilities, and the low level of bureaucratic readiness to adapt to the digital system transformation.

Keywords: Implementation of public policy, Regional Government Information System (SIPD), Accountability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah menciptakan satu tatanan baru dalam kehidupan masyarakat. Dimana saat ini masyarakat tidak hanya aktif secara langsung dalam kehidupan sosial melainkan telah berkembang ke dalam dunia digital. Ruang digital telah menjadi tempat dimana masyarakat beraktivitas secara online, dimulai dari aktivitas pekerjaan hingga pertukaran informasi dalam kehidupan sosial masyarakat telah dapat dilakukan secara digital yang demikian telah menciptakan tidak adanya batasan antara informasi dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung menciptakan dorongan dan tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah untuk melakukan transformasi pada tubuh birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini pelaksana pemerintahan diharapkan mampu menangkap dinamika kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembaharuan dan transisi pada sektor publik yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Melalui transformasi atau perubahan yang terjadi nantinya diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong perwujudan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta mampu mengikuti perkembangan era dan kemajuan teknologi.

Demikian menjadi jelas bahwa, disamping perkembangan era dengan kemajuan teknologi dan informasi secara nyata bahwa diperlukan adanya satu kebijakan inovatif pada birokrasi publik dengan tujuan dapat memberikan perubahan secara mendasar serta mendorong terwujudnya birokrasi pemerintahan

yang efektif dan efisien serta mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Adapun hal ini selaras dengan pendapat Mas'ud Said (2007) yang menyatakan bahwa inovasi merupakan perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja di instansi tertentu dengan didukung oleh instansi lainnya yang terkait, dan atau perbaikan cara kerja yang lebih berdaya guna dengan mengintegrasikan sumber daya sosial, sumber daya pegawai dan sumber daya kelembagaan akan mendorong terbentuknya nilai tersendiri di dalam prespektif masyarakat.

Sedangkan makna dari kebijakan publik secara konseptual dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diambil dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu yang didasarkan pada kepentingan publik atau masyarakat. Sebagaimana menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Arifah Umi, 2018). Sedangkan menurut Wahab, kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri (Wahab, 2010).

Berdasarkan definisi kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan satu tindakan dengan tujuan tertentu yang diambil oleh pemerintah atas dasar kepentingan masyarakat. Adapun dalam rangka memenuhi dan merespon aspirasi masyarakat atas urgensi transformasi pada sektor publik yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, hingga saat ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dengan tujuan mendorong

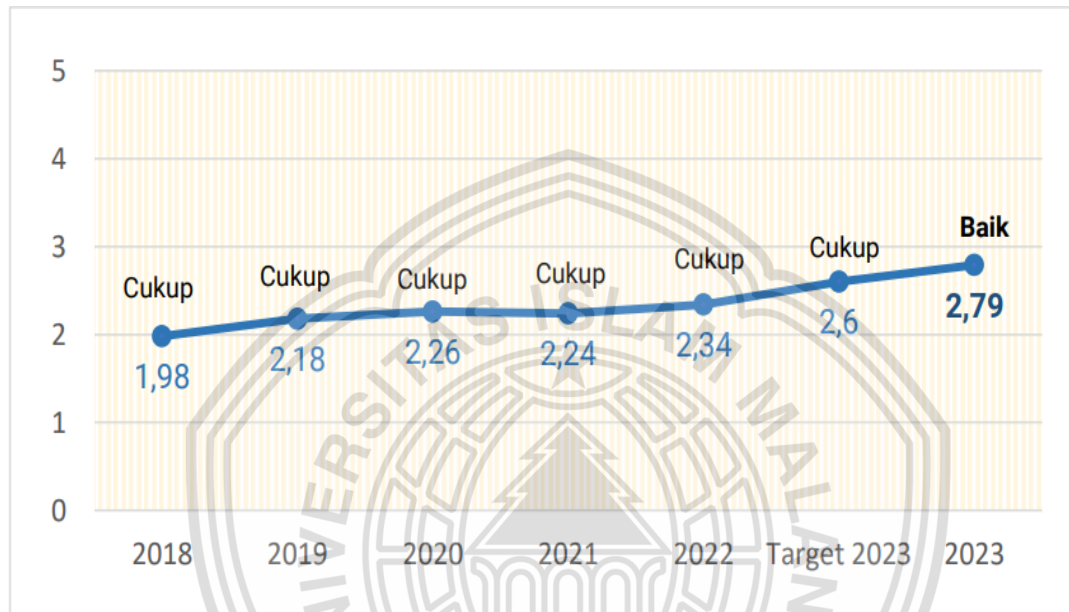
percepatan terwujudnya *Good Governance*. Salah satunya yaitu kebijakan yang tertuang melalui Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh presiden Joko Widodo, menjadi pemantik utama jalannya pelaksanaan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Melalui Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) inilah kemudian penerapan kebijakan ini terus dilaksanakan baik dalam ruang lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Arahan presiden Joko Widodo memberikan dorongan dan perubahan besar pada tubuh birokrasi pemerintahan, sebagaimana transformasi perubahan dapat terlihat yang sebelumnya menggunakan metode konvensional berubah menjadi berbasis elektronik.

Perubahan yang terjadi juga dapat terlihat melalui data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 terkait Laporan Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Menurut data terakhir KemenpanRB terdapat 631 instansi pemerintah pusat dan daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan

kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Adapun dalam hal ini, data indeks pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional dapat terlihat dibawah ini;

Gambar 1. 1 Indeks Pelaksanaan SPBE Nasional Tahun 2018- 2023.



Sumber : Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2023 (PANRB).

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa nilai indeks pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sejak tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Menurut hasil laporan dan evaluasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023, KEMENPANRB menyatakan dari 621 instansi pemerintah secara nasional. Terdapat 24 instansi pemerintah pusat dan daerah yang memperoleh predikat memuaskan. Adapun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, indeks yang diperoleh pada pelaksanaan SPBE tahun 2023 yaitu sebesar 2.79 dengan pedikat baik.

Menurut Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan *key driver* transformasi digital yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis elektronik yang memberikan dampak terhadap menguatnya kembali tingkat kepuasan masyarakat dan mendorong pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan yang berkualitas. Dalam hal ini, menteri PANRB berharap setiap pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat meningkatkan kualitas penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana menyelaraskan dengan komitmen presiden dalam mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE secara nasional dengan tujuan dapat meningkatkan kembali kualitas pelayanan public dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Berbagai inovasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik hingga saat ini terus bermunculan, salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan SPBE yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu wujud keluaran dari penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui peraturan menteri dalam negeri No 70 Tahun 2019 yang mulai diberlakukan pada tanggal 27 september tahun 2019. Dimana tujuan dari berlakunya kebijakan sistem informasi pemerintah daerah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu tujuan dari berlakunya kebijakan sistem informasi pemerintah daerah yaitu

meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan amanat presiden.

Secara spesifik kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah merupakan layanan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya secara terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah. Adapun manfaat sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dapat terlihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1. 1 Manfaat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bagi Stakeholder

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Masyarakat	Pelaku Usaha
Tersedianya informasi pemerintah daerah secara terintegrasi	Efektifitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah secara terintegrasi dan terhubung	Mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara terintegrasi dalam satu website	Mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan pemerintah daerah sebagai dasar pertimbangan investasi
Bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional	Mempermudah penyampaian informasi antar tingkatan pemerintahan		
Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah			

Sumber : Keuda.Kemendagri.go.id

Melalui layanan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) inilah kemudian Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah terintegrasi dan terkonsolidasi secara baik dalam satu data nasional, serta dengan adanya layanan

sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) menjadikan penggunaan sistem informasi yang terpadu dan bisa diakses secara mudah oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi alternatif layanan bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam suatu pemerintahan baik tingkat pusat maupun lokal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan pelaksanaan kebijakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) diharapkan menjadi pemantik dasar terselenggaranya akuntabilitas pemerintahan yang baik. Sebagaimana jika dikaji secara konseptual Implementasi Kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat atau diputuskan secara terstruktur dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Implementasi Kebijakan menurut Leo Agustino (2008) yaitu suatu proses dinamis dimana kebijakan dilaksanakan melalui aktivitas dan kegiatan yang akhirnya menghasilkan suatu tujuan dan sasaran dari kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008). Sedangkan Menurut Guntur Setiawan (2004) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004). Dalam hal ini, implementasi secara dasar diartikan pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem yang bermakna bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Beberapa penelitian terdahulu terkait implementasi kebijakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di berbagai organisasi public masih menunjukkan berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yosephus Yacobus David (2022) menunjukkan bahwa sumber daya manusia Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sudah memenuhi dan memahami bagaimana kebijakan SIPD. Sedangkan pada Organisasi Perangkat Daerah terkendala dengan jumlah pelaksana yang memahami dan sumber daya seperti akses jaringan konektivitas jaringan internet, sedangkan stuktur birokrasi, belum adanya keputusan kepala daerah tentang Tim Pengelolaan Data Kabupaten Asmat, pembagian tugas dan fungsi tidak sesuai dengan akun-akun di aplikasi mengakibatkan rangkap tugas dan fungsi dari pelaksana sehingga keterlambatan penginputan sesuai dengan jadwal penyusunan dokumen perencanaan.

Selain itu juga dapat terlihat melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Alikha Novira (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Garut masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada Sumber daya manusia dan fasilitas penunjang masih kurang. Selain itu, disposisi mengenai sikap pelaksana masih banyak yang tidak disiplin. Salah satu kelemahan dalam kebijakan adalah belum adanya mekanisme mempermudah Bappeda dalam melakukan evaluasi data dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bebagai macam dinamika permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan akan selalu ditemukan. Hal ini terjadi karena pada setiap organisasi publik memiliki kondisi budaya kerja dan lingkungan kerja yang berbeda-beda. Berdasarkan pemaparan studi penelitian terdahulu diatas dapat terlihat berbagai macam dinamika permasalahan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atas arahan Kemetrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Permasalahan dalam suatu pelaksanaan kebijakan sejatinya tidak bisa dihindarkan, dalam hal ini diperlukan waktu dan proses sosialisasi kebijakan yang sistematis untuk mempersiapkan segala aspek dalam suatu organisasi publik untuk siap dalam menjalankan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) diharapkan menjadi pemantik dasar terselenggaranya akuntabilitas pemerintahan yang baik. Dimana menurut Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan bahwa (Keuda.Kemendagri.go.id):

“Melalui penetapan menjadi aplikasi umum SPBE, maka akan berdampak pada keterpaduan layanan digital pemerintah, konsolidasi data untuk menjadi Big Data Analytic dalam pengambilan keputusan/kebijakan (Data-Driven Policy), akuntabilitas penyelenggaraan administasi pemerintahan, serta efisiensi dalam pengelolaan layanan TIK Nasional dengan mengutamakan prinsip berbagi pakai dan interoperabilitas sistem informasi,”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat terlihat bahwa kebijakan sistem informasi pemerintah daerah bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen perencanaan dan penganggaran, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan

efisiensi dalam pengelolaan dana pembangunan. Adapun berdasarkan analisis penulis tujuan dari kebijakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran: SIPD memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan secara lebih terstruktur, berbasis data yang akurat dan terkini, serta menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya SIPD, publik dapat lebih mudah mengakses informasi terkait anggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah, yang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
3. Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Baik: SIPD memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek pembangunan sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian target dan apakah alokasi anggaran digunakan dengan tepat.
4. Pengintegrasian Data: SIPD bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai data dari berbagai sumber, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan.

Demikian berdasarkan pemaparan diatas, tingginya komitmen pemerintah pusat dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta adanya inovasi layanan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) oleh Kemendagri, menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejatinya juga menghadapi masalah dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dimulai dari aspek komunikasi kebijakan hingga kemampuan sumber daya manusia serta aspek fasilitas dalam layanan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) oleh Kemendagri masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan peneliti pada beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih terdapat sejumlah kendala yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, komitmen pelaksana kebijakan, serta dukungan sarana teknologi informasi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa tidak semua aparaturnya yang ditugaskan sebagai operator SIPD memiliki pemahaman yang memadai terkait mekanisme pengoperasian sistem, sehingga proses penginputan data perencanaan dan penganggaran daerah terkadang mengalami keterlambatan. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan salah satu operator SIPD Bakesbangpol di Kabupaten Pasuruan yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya memang masih ada pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem SIPD, terutama bagi pegawai yang baru ditugaskan sebagai operator sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem.”

(Hasil wawancara pendahuluan dengan operator SIPD pada salah satu OPD di Kabupaten Pasuruan, 2025)

Selain itu, aspek komitmen organisasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SIPD di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu staf perencanaan pada organisasi perangkat daerah diketahui bahwa penggunaan SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan masih belum sepenuhnya menjadi prioritas utama bagi sebagian perangkat daerah.

“Sebagian OPD biasanya melakukan penginputan data ketika mendekati batas waktu yang ditentukan, sehingga proses verifikasi dan sinkronisasi data perencanaan sering dilakukan secara terburu-buru.”

(Hasil wawancara pendahuluan dengan staf perencanaan OPD Kabupaten Pasuruan, 2025).

Berdasarkan temuan awal dilapangan terkait berbagai permasalahan yang

muncul dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dapat dipahami bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek penggunaan teknologi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi, sumber daya manusia, serta komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan sistem tersebut secara konsisten. Dengan demikian, implementasi SIPD tidak hanya dipahami sebagai proses administratif dalam penggunaan aplikasi perencanaan dan penganggaran daerah, melainkan juga sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, integrasi data, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan SIPD di tingkat organisasi perangkat daerah, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum meratanya komitmen dalam memanfaatkan sistem secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIPD belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan SIPD dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Analisis tersebut penting dilakukan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan secara komprehensif, terutama dalam melihat hubungan antara proses pelaksanaan kebijakan dengan manfaat kebijakan yang diharapkan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan

daerah. Dalam konteks ini, penelitian mengenai implementasi SIPD menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong perubahan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian ini berupaya untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III serta pendekatan implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Melalui pendekatan tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan SIPD sekaligus menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terdahulu umumnya berfokus pada aspek deskriptif, seperti efektivitas sistem, digitalisasi administrasi, serta peningkatan akuntabilitas secara umum. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas dalam mengkaji secara komprehensif hubungan antara karakteristik kebijakan dan kondisi lingkungan implementasi dalam perspektif teori implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang tidak hanya digunakan untuk menganalisis proses implementasi SIPD, tetapi juga untuk mengkaji derajat perubahan (*extent of change envisioned*) yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Penelitian ini juga mengintegrasikan aspek *content of policy* dan *context of implementation* untuk menjelaskan faktor kunci dan faktor penghambat implementasi,

sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan?
2. Apa faktor kunci dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan?
3. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan?
4. Bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor kunci dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

4. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan data dalam perkembangan ilmu administrasi publik terutama bidang kebijakan publik pada pelaksanaan kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
2. Memberi wawasan yang baru bagi peneliti dan pembaca mengenai bagaimana implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau manfaat kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat mengenai Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun penelitian ini dilakukan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yang diantaranya terdiri dari 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 4) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, 5) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan, dan 6) Bagian Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan teori implementasi menurut G. Edward III yang terdiri dari 4 dimensi diantaranya 1) Komunikasi, 2) Disposisi, 3) Sumber Daya dan 4) Struktur Organisasi. Dalam penelitian ini juga peneliti menambahkan 2 dimensi dalam teori implementasi kebijakan menurut S Grindel yang diantaranya seperti dimensi Tipe manfaat (*type of benefits*) dan dimensi Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*).

Dalam penelitian ini juga mencakup analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan SIPD, seperti sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta aspek regulasi dan koordinasi antar unit kerja pada lokasi penelitian, dengan subjek penelitian terdiri dari pejabat struktural, staf pelaksana, dan operator yang terlibat langsung dalam pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah menunjukkan kinerja implementatif yang efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi tersebut tercermin dari terpenuhinya enam dimensi kunci implementasi kebijakan yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

1. Dimensi komunikasi merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan. Komunikasi berfungsi tidak hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana koordinasi dan penyamaan persepsi antar-OPD. Proses komunikasi berjalan efektif melalui sosialisasi, rapat koordinasi, penyampaian regulasi, serta pendampingan teknis oleh BPKPD. Kejelasan dan konsistensi informasi ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman operator dan minimnya kesalahan input. Dengan demikian, komunikasi juga berperan sebagai mekanisme kontrol dalam menjaga keselarasan implementasi kebijakan..
2. Dimensi Sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung

implementasi SIPD, meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan infrastruktur teknologi. Secara umum, setiap OPD telah memiliki operator SIPD, meskipun terdapat perbedaan kompetensi yang diatasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Sarana prasarana dan akses sistem relatif memadai, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan server. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya adaptif untuk mengatasi kendala tersebut.

3. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan SIPD. Aparatur pemerintah tidak hanya menjalankan kebijakan sebagai bentuk kepatuhan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sikap positif ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD..
4. Dimensi struktur organisasi memperlihatkan bahwa setiap OPD memiliki struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas yang terdefinisi. Meskipun sebagian besar OPD masih bergantung pada SOP dari Kemendagri tanpa adaptasi internal, struktur ini tetap mampu mendukung pelaksanaan SIPD secara sistematis dan terkoordinasi.
5. Dimensi tipe manfaat mengindikasikan bahwa SIPD memberikan manfaat signifikan terhadap transparansi, akuntabilitas, integrasi data, efisiensi proses perencanaan dan penganggaran, serta sinkronisasi kebijakan lintas- sektor. Adapun manfaat-manfaat tersebut memperkuat terwujudnya praktik good governance di Kabupaten Pasuruan.

6. Dimensi derajat perubahan menunjukkan bahwa SIPD membawa perubahan fundamental pada budaya kerja birokrasi dari pola manual menuju digital dan terintegrasi. Meskipun terdapat resistensi dan tantangan, terutama terkait kapasitas SDM dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil merespons melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan adaptasi teknologi.

Selain temuan diatas, adapun faktor kunci dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pemeritah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diantaranya sebagai berikut.

1. Faktor Kunci

Faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu didasarkan dari adanya komunikasi yang efektif antara Kemendagri dan pemerintah daerah, serta koordinasi internal antar-OPD, berperan besar dalam mencegah distorsi pemahaman kebijakan. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, perangkat teknologi yang mendukung, serta kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berkala menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan penggunaan SIPD. Komitmen yang tinggi dari para implementator ditunjukkan melalui kesungguhan operator, pejabat teknis, dan pimpinan OPD dalam mengikuti

prosedur serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan merupakan faktor strategis dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas, lengkap dengan pembagian tugas dan penanggung jawab, turut memperkuat koordinasi dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan SIPD yang akuntabel.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terutama berkaitan dengan keterbatasan kualitas sarana dan prasarana sistem yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem SIPD kerap mengalami gangguan teknis, khususnya pada periode tertentu ketika terjadi lonjakan akses secara nasional oleh berbagai OPD di seluruh Indonesia. Kondisi ini menghambat kelancaran proses input, pemutakhiran, maupun pengelolaan data yang menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan tersebut.

3. Kontribusi Implementasi SIPD terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Implementasi SIPD memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan. Kontribusi tersebut terlihat dalam empat dimensi akuntabilitas, yaitu:

(1) meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi melalui sistem yang

- terstandarisasi (akuntabilitas kejujuran dan kepatuhan hukum);
- (2) meningkatnya transparansi dan keterlacakan dalam proses perencanaan dan penganggaran (akuntabilitas proses);
- (3) meningkatnya efektivitas program melalui penerapan indikator kinerja yang terukur (akuntabilitas program); serta
- (4) meningkatnya kualitas pengambilan kebijakan yang berbasis data (akuntabilitas kebijakan).

Dengan demikian, SIPD tidak hanya berperan sebagai sistem administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju digital governance yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, terdapat sejumlah faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sebagai bentuk refleksi akademik dalam hal ini peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut.

1. Penguatan Infrastruktur Sistem oleh Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri selaku pemangku kepentingan utama diharapkan melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap infrastruktur layanan SIPD. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah penyediaan server khusus yang didedikasikan untuk operasional SIPD. Upaya ini akan mendukung kelancaran

implementasi sistem sekaligus memperkuat perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Pengembangan Fitur Penginputan Data

Kementerian Dalam Negeri diharapkan melakukan inovasi pada aspek pengelolaan dan penginputan data dalam SIPD. Penambahan fitur unggah (upload) dokumen diperlukan untuk mempermudah proses input data, mengurangi beban kerja manual, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia (human error) dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Perbaiki Manajemen Waktu Operasional Sistem

Kementerian Dalam Negeri juga diharapkan melakukan penyesuaian terhadap manajemen waktu operasional portal SIPD. Alokasi jam operasional yang lebih terfokus pada hari dan jam kerja akan mempermudah koordinasi antar pelaksana kebijakan di organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga proses pengelolaan data dapat berjalan lebih terstruktur dan optimal.

4. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Secara teoritis, hasil penelitian ini beserta keterbatasannya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang relevan. Penelitian lanjutan diharapkan mampu mengkaji implementasi kebijakan SIPD dari perspektif teoritis yang lebih beragam sehingga dapat memperkaya pengembangan kajian terkait tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Andersen, T. B. (2009). E-government as an anti-corruption strategy. *World Development*, 37(1), 201–210.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Brockwell, E., & Elofsson, K. (2020). The role of water quality for local environmental policy implementation. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(6), 1001–1021.
- Dorania, A. L. (2020). Urgensi transformasi pelayanan publik melalui e-government pada new normal dan reformasi regulasi birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 221.
- Garst, B., Dubin, A., Bunke, C., Schellpfeffer, N., Gaslin, T., Ambrose, M., & Hashikawa, A. (2021). Barriers impacting organizational immunization policy implementation in U.S. and Canadian summer camps. *Children's Health Care*, 50(2), 207–219.
- Herdiansyah, H. (2013). Wawancara, observasi, dan focus groups. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hanifah, S. I. & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal dan Riset Ilmu Akuntansi*, Vol. 4 No. 8 (2015). http://www.academia.edu/download/56572413/AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDES.pdf.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484.
- Hood, C. (2010). Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? *West European Politics*, 33(5), 989–1009.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: Can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Islamy, M. I. (2018). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Jakarta: PT Bina Aksara.

- Iriawan, M. (2019). *Dasar-dasar administrasi publik dari klasik ke kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad. (2019). *Pengantar ilmu administrasi negara*. Aceh: Unimal Press.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku organisasi dan kepemimpinan pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Muslih, M., Rahadi, D. R., & Marbun, S. O. (2020). Tata kelola pemerintahan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, February, 1–7.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021a). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- _____. (2021b). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. (2009). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- OECD. (2019). *Digital government review: Enhancing public sector performance*. Paris: OECD Publishing
- Pratama, A. B., & Widodo, J. (2020). Digitalisasi perencanaan pembangunan daerah dalam meningkatkan transparansi. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115–130.
- Putra, R. D., Sari, N., & Nugroho, A. (2022). Implementasi e-government dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 14(1), 45–58.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Eyne, A., Gazali, A., & Salindeho, A. (2021). Analysis of local government information system (SIPD) implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bitung City Government.

Purwanto, E. A., & Sulisyastuti, D. R. (2015). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasi di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Roengtam, S., & Agustiyara, A. (2022). Collaborative governance for forest land use policy implementation and development. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2073670. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2073670>

Said, M. M. (1987). Perspektif perilaku birokrasi. Jakarta: Rajawali.

_____. (2007). Birokrasi di negara biokratis. Malang: UMM Press.

Salindeho, A. (2017). The role of regional government information system (SIPD) on the Sub-District of Aertembaga's financial accountability (2017–2020).

Sari, D., & Nugroho, R. (2021). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 67–80.

Setiawan, G. (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.

Sinambela, L. P. (2008). Reformasi pelayanan publik: Teori kebijakan dan implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2015). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2009). Metodologi penelitian pendidikan: Kompetensi dan praktiknya. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suyanto, B. (2008). Metode penelitian sosial. Jakarta: Kencana.